

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam jangka panjang, peningkatan hasil perekonomian dalam bentuk barang atau jasa dapat disebut sebagai pengertian pertumbuhan ekonomi, elemen pengukuran pada pertumbuhan ini terdiri dari adanya perubahan output, dan jangka waktu. Pertumbuhan ekonomi ini berjalan untuk waktu yang tidak singkat, sehingga untuk melihat hasil akhir pertumbuhan ini dapat diketahui melalui aktivitas yang dinamis dari pertumbuhan yang berubah setiap waktu. Pertumbuhan ekonomi mengandung arti bahwa telah terjadi peningkatan kapasitas produksi melalui kenaikan pendapatan nasional.<sup>17</sup>

##### **2. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di negara tersebut. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, jika pendapatan nasional meningkat maka tingkat peluang pekerjaan juga meningkat

---

<sup>17</sup>Valentine Siagin, et. all., *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 36

serta standar hidup masyarakat pun akan meningkat, teknologi dapat berkembang dengan pesat, dan dapat melancarkan kegiatan ekonomi.

### 3. Alat Ukur Pertumbuhan Ekonomi

Alat ukur dalam penelitian menggunakan produk domestik regional bruto yang digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ini untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi data tersebut dalam bentuk tahunan dan menggunakan satuan presentase. Berikut ini adalah cara perhitungan yang diaplikasikan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

$$PE_{\text{per tahun}} = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

## B. Desentralisasi Fiskal

### 1. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Pengertian desentralisasi fiskal adalah penyaluran anggaran kepada pemerintah dengan tingkat lebih rendah oleh pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi dengan tujuan untuk mendukung kewajiban dan fungsi pemerintah yang didelegasikan. Desentralisasi dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari kebijakan otonomi daerah. *Money follow function* harus dipatuhi sebagai prinsip dasar. Singkatnya, pengalihan atau pendelegasian kekuasaan pemerintah memiliki konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk menjalankan

---

<sup>18</sup>Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa, "Pengaruh ....., hal. 235

kekuasaan ini. Kompensasi finansial diberikan melalui mekanisme dana kompensasi, distribusi pendapatan antar tingkat negara bagian, dalam rangka melaksanakan tugas negara dalam rangka desentralisasi.<sup>19</sup>

## 2. Tujuan Desentralisasi Fiskal

Tujuan desentralisasi Fiskal adalah untuk mencegah terjadinya tirani dalam pemerintahan karena adanya akumulasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu pihak

- a. Dalam politik, pelaksanaan desentralisasi dipandang sebagai tindakan demokratis dengan menjadikan rakyat sebagai pemerintah itu sendiri sehingga hak-hak demokrasi dapat dijalankan.
- b. Untuk mencapai pemerintahan yang efisien maka, merupakan satu-satunya yang melatarbelakangi adanya desentralisasi apabila dilihat dari perspektif organisasi suatu pemerintahan.
- c. Dalam kultur budaya, mengenai keadaan penduduk, watak kebudayaan atau latar belakang, keadaan geografi, dan kegiatan ekonomi maka perlu adanya desentralisasi agar mendapat perhatian yang sepenuhnya.
- d. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka desentralisasi diperlukan sehingga pemerintah daerah dapat memiliki

---

<sup>19</sup>Suwandi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), hal. 26

kewenangan secara langsung dan lebih besar dalam mendukung pembangunan perekonomian.

### 3. Manfaat Desentralisasi Fiskal

Adanya desentralisasi, akan memberikan manfaaf-manfaat dari tugas yang dilakukan pemerintah antara lain:

- a. Pemerintah dapat melaksanakan tugas dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pemerintahan.
- b. Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan karena adanya kewenangan untuk mengatur pemerintahanya.
- c. Menjadikan pemerintah memilkik komitmen, motivasi moral, dan produktivitas.<sup>20</sup>

### 4. Alat Ukur Desentralisasi Fiskal

Alat ukur yang digunakan untuk memproyeksikan desentralisasi fiskal yang merupakan proses emberian anggaran kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam penelitian in adalah berupa:<sup>21</sup>

$$DF_{\text{per tahun}} = \frac{\text{PAD+Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak}}{\text{Realisasi Total Pengeluaran Pemkab/Kota}} \times 100\%$$

---

<sup>20</sup>Muhammad Idris Patarai, "*Kinerja Keuangan daerah*", hal. 46

<sup>21</sup>Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa, "Pengaruh ....., hal. 235

## **C. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Sesuai dengan pernyataan mengenai Pengelolaan Keuangan daerah dari Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 21 ayat 1, sedangkan yang menjelaskan mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 26 ayat 1, dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai penerimaan pendapatan yang diterima oleh suatu daerah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 585 ayat 1.<sup>22</sup>

### **2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan otonomi daerah dengan adanya pendapatan asli daerah, sehingga dapat menaikan biaya daministrasi daerah sebagai wujud dari prinsip desentralisasi. Adanya hal tersebut menjadikan pemerintah daerah untuk tidak bergantung terhadap pemerintah pusat dalam kegiatan pendanaan kegiatann pemerintahan berupa dana

---

<sup>22</sup>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, “Mengenal Pendapatan Asli Daerah”, dalam [http://bpkad.natunakab.go.id/article/article\\_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD](http://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD), diakses 30 Juni 2021

alokasi umum atau DAU yang didapatkan dari dana perimbangan yang dialokasikan dalam APBN.<sup>23</sup>

### 3. Alat Ukur Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pengertian mengenai pendapatan asli daerah tersebut, maka rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pajak Daerah} + \text{Lain-lain PAD yang sah}^{24}$$

## D. Kinerja Keuangan Daerah

### 1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Penjelasan mengenai Kinerja Keuangan Daerah dalam sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2006 bab 1 pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwasanya kegiatan pengaturan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan juga berhubungan dengan hak serta kewajiban pemerintah daerah serta dapat dinilai dengan uang, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan daerah dalam bentuk kerangka APBD. Pengelolaan terhadap APBD secara khusus, merupakan hasil dari adanya otonomi daerah dan pada umumnya dapat mengakibatkan perubahan dalam mengelola keuangan daerah.

---

<sup>23</sup>Johny Montolalu dan Joorie M. Ruru, "Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan", hal. 2

<sup>24</sup>Gita Dinata, Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan PAD Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah, (Padang, Artikel Akuntansi, 2013), hal. 5

## 2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Untuk menganalisis ukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan mengetahui analisis rasio keuangan dengan ketetapan dan pelaksanaan APBD. Tujuan dan hasil dilakukannya kegiatan analisis rasio keuangan tersebut akan digunakan berikut ini::

- a. Mengukur kegiatan pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan suatu daerah.
- b. Menilai ketepatan dan keberhasilan dan penggunaan pendapatan suatu daerah.
- c. Menilai besaran kegiatan pemerintahan dalam belanja dari perolehan pendapatan daerah.
- d. Menilai pendapatan daerah yang diperoleh dari kontribusi setiap sumber pendapatan.
- e. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dalam periode tertentu berupa besaran pengeluaran dan pendapatan daerah.<sup>25</sup>

## 3. Alat Ukur Kinerja Keuangan Daerah

Alat ukur kinerja keuangan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan menggunakan rasio efisiensi, dimana rasio tersebut merupakan salah satu rasio yang mempunyai pengaruh signifikan

---

<sup>25</sup> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, "Kinerja Keuangan Daerah", dalam <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/>, diakses 30 Juni 2021

terhadap pertumbuhan ekonomi, perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

$$RE_t = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

## E. Dana Alokasi Umum

### 1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Pernyataan mengenai pengertian dana alokasi umum yaitu satu unsur yang dapat dikatakan sebagai bagian dalam dana perimbangan atau yang dapat dikatakan sebagai kegiatan pendanaan terhadap pemerintah daerah agar tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersumber dari APBN.<sup>27</sup>

### 2. Alokasi Dana Alokasi Umum

- a. Pendanaan melalui dana alokasi umum hanya diberikan kepada daerah dengan tingkat yang lebih rendah seperti daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.
- b. Dalam menentukan jumlah besaran dana alokasi umum yang diberikan tidak boleh kurang dari 26% yang didapatkan dari Pendapatan Dalam negeri Netto sesuai dengan ketepatan dari APBN.

<sup>26</sup>Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa, "Pengaruh ....., hal.237

<sup>27</sup>Kementrian Keuangan, "Dana Alokasi Umum", dalam <https://klc.kemenkeu.go.id/dana-alokasi-umum/>, diakses 30 Juni 2021

- c. Pemerintah kota/kabupaten dan provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran proporsi pendanaan untuk setiap provinsi dan kabupataen atau kota yang berbentuk dalam dana alokasi umum.

### 3. Alat Ukur Dana Alokasi Umum

Alat uku yang digunakan untuk menghitung dana alokasi umu adalah pengurangan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengsn kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) suatu daerah dan meerupakan alokasi dasar yang merupakan jumlah dari gaji pegawai negeri sipil yang disebut dengan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*). Rumus yang digunakan dalam perhitungan pendekatan celah fiskal adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

### F. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat terdorong secara langsung oleh kebijakan fiskal.<sup>29</sup> Terdapat tiga akibat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh desentralisasi. Pertama, bahwa desentralisasi dinilai mampu menngkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara adanya efek secara dinamis oleh keberhasilan ekonomi dalam sektor pengeluaran pemerintah. Bedasaeakan hal tersebut, terdapat hubungan atau korelasi positif antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, adanya

---

<sup>28</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dalam [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses 30 Juni 2021

<sup>29</sup> Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.9 No.1 Tahun 2008, hal. 47

desentralisasi dapat menjadikan timbulnya ketidakstabilan perekonomian secara menyeluruh atau makro. Berdasarkan hal tersebut, hubungan atau korelasi negatif antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, peranana desentralisasi akan menimbulkan dampak yang berbeda pada setiap negara, dalam negara maju dan berkembang, desentralisasi tidak akan begitu dapat dirasakan apabila negara tersebut masih dalam kategor negara berkembang.

Alasan dinegara berkembang bahwa desentralisasi tidak begitu dirasakan karena dalam pemerintahan daerah tidak dapat memanfaatkan informasi tentang anggotanya. Kepengurusan dapat ditunjuk berdasarkan kewenangan. Alasan lainya bahwa didalam negara berkembang berkemungkinan besar dalam pengelolaan anggaran dikarenakan sumber daya manusia yang dimilliki serta sumber daya keuangan negara yang terbatas.

#### **G. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Adanya otonomi suatu daerah yang didapatkan dari suatu negara mengakibatkan timbulnya kewenangan secara penuh dalam mengelolah pendapatan daerah oleh pemerintah termasuk dalam pendapatan asli daerah. Kegunaan pendapatan asli suatu daerah dapat dimanfaatkan guna memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah yang berupa pembangunan fasilitas dan infrastruktur berasal dari pendapatn asli daerah tersebut. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur suatu daerah dapat menandakan

bahwa suatu daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi dalam keadaan baik, dikarenakan kemudahan perekonomian ketika adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan menjadikan kegiatan ekonomi semakin lancar.<sup>30</sup>

#### **H. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan ketepatan anggaran tersebut, dikarenakan adanya kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah harus sesuai dengan tujuan prioritas pembangunan daerah tersebut, ketika terjadi ketidak ketepatan pembangunan maka akan terjadi pemborosan terhadap anggaran. Kinerja keuangan suatu daerah dapat memiliki dua indikator yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja, dengan demikian maka penggunaan anggaran kinerja tersebut harus efektif dan efisien. Untuk meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengeluarkan berbagai aturan kebijakan dengan syarat bahwa harus menggunakan prinsip transparan dan akuntabilitas, pemerintahan *good governance*, dan mendorong laju perekonomian dengan melakukan audit dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah yang bersaal dari APBD.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pungky Siswiyanti, *Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*, (Surabaya, Vol.07, No.1, 2015), hal. 12

<sup>31</sup> Dina Apriana dan Rudy Suryanto, ".....", hal. 247

## I. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu instrumen dana perimbangan yang berupa dana alokasi umum diharapkan dalam penggunaannya mampu menghilangkan kesenjangan fiskal dalam masyarakat dapat dengan cara melaksanakan pembangunan infrastruktur selain itu juga dapat digunakan dalam membangun sarana dan prasarana suatu daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan laju perkonomian suatu daerah.<sup>32</sup>

## J. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sang made dan Made Sukrasa tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh *fiscal stress* dan desntralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah. Metodologi penelitaian yang dipakai dalam kegiatan penelitain tersebut berupa pengaruh secara langsung dan tidak langsung menggunakan analisis jalur dengan memakai data sekunder dari Kemenkeu, BPS, dan Bappeda kabupaten/ kota di provinsi Bali. Hasil kegiatan penelitian yang didapatkan adalah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh desntralisasi fiskal secara langsung dan signifikan. Selanjtnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh *fiscal stress* secara langsung dan signifikan . sedangkan secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh desntralisasi fiskal dan *fiscal stress* melalui kinerja keuangan daerah secara tidak langsung dan

---

<sup>32</sup> Pungky Siswiyanti, "Pengaruh PAD, DAU,.....", hal. 13

signifikan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kinerja keuangan berpengaruh secara langsung dan signifikan.<sup>33</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel bebas desentralisasi fiskal dan keuangan daerah terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta penelitian yang dilakukan pada Provinsi Jawa Timur.

Penelitian Dina dan Rudy tahun 2010 bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kecukupan daerah yang dipengaruhi oleh variabel bebas pendapatan asli daerah serta variabel bebas lainnya yaitu belanja modal. Hasil dalam kegiatan penelitian yang dilakukan adalah kecukupan daerah dipengaruhi secara tidak signifikan oleh belanja modal, selain hal tersebut kecukupan daerah juga dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pendapatan asli daerah, untuk variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara tidak signifikan oleh belanja modal dana, serta pendapatan asli daerah, dan kecukupan asli daerah.<sup>34</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel bebas pendapatan asli daerah terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas belanja modal serta

---

<sup>33</sup> Sang Made Muryaman dan Made Sukarsa, Pengaruh deentralisasi Fiskal, Fiscal stress, dan Kinerja keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5, No.2 tahun 2016, hal 229

<sup>34</sup> Dina Apriana dan Rudy Suryanto, Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali), *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.11, No.1, tahun 2010, hal.68

penelitian yang dilakukan tidak mencakup wilayah Jawa Bali melainkan hanya provinsi Jawa Timur saja.

Penelitian selanjutnya yang dilaksanakan oleh Marwani, Darwanis, dan Syukury tahun 2013 memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas belanja modal dan dampaknya pada variabel pertumbuhan ekonomi oleh pendapatan asli daerah serta dana alokasi umum. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder 21 kabupaten/kota provinsi Aceh yang diperoleh dari website resmi kementerian keuangan dan badan pusat statistik. Hasil penelitian untuk didapatkan yaitu belanja modal dan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pendapatan asli daerah, belanja modal dipengaruhi baik secara signifikan dan negatif oleh dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh dana alokasi umum, dan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal.<sup>35</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel bebas dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas belanja modal serta sampel penelitian yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2016-2020.

Selanjutnya adalah kegiatan penelitian oleh Citra Ayu 2010 dengan memiliki tujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh tingkat besaran pengeluaran untuk pendidikan ,

---

<sup>35</sup> Mawarni, et.all., Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh), *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2 tahun 2013, hal. 80

pengaruh variabel jumlah tenaga kerja dan variabel tingkat pendidikan pekerja. Metodologi yang digunakan dalam kegiatan penelitian tersebut adalah model persamaan regresi *fixed effect* yang didapatkan dari hasil regresi data panel menggunakan data sekunder 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh keseluruhan variabel bebas berupa tingkat besaran pengeluaran untuk pendidikan, pengaruh variabel jumlah tenaga kerja dan variabel tingkat pendidikan pekerja.<sup>36</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan pekerja dan jumlah tenaga kerja serta sampel penelitian yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2016-2020.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Umi Kalsum yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel inflasi dan pengangguran. Metodologi penelitian yang dipakai berupa pendekatan kuantitatif dengan memakai analisis regresi linier berganda serta menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Sumatra Utara dalam bentuk data sekunder. Hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya variabel pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengangguran dan pertumbuhan ekonomi juga

---

<sup>36</sup> Citra Ayu Basica Effendy Lubis, Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi*, Vol.10, No.2, tahun 2014 hal. 187

dipengaruhi oleh variabel lain secara tidak signifikan oleh inflasi.<sup>37</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas pengangguran dan inflasi serta sampel penelitian yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2016-2020.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Sri tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh variabel bebas pengeluaran pemerintah, keterbukaan ekonomi, investasi swasta, tenaga kerja dan investasi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji t dan uji f. Hasil penelitian merenungkan bahwa variabel terikat pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh variabel bebas pengeluaran pemerintah, variabel terikat pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh keterbukaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh investasi pemerintah. Sedangkan secara simultan, variabel tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan investasi pemerintah, keterbukaan pemerintah keterbukaan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat penelitian berupa pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara

---

<sup>37</sup> Umi Kalsum, Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara, *Jurnal fakultas Bisnis dan Ekonomi*, hal. 67

simultan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas pengeluaran pemerintah, keterbukaan ekonomi, investasi swasta, tenaga kerja dan investasi pemerintah<sup>38</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas investasi pemerintah, tenaga kerja, keterbukaan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah, serta sampel penelitian yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2016-2020.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Herman tahun 2017 yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh inflasi. Metodologi penelitian yang dipakai dalam kegiatan penelitian berupa analisis regresi sederhana dan menggunakan bentuk data yang sekunder. Hasil dalam kegiatan penelitian ini adalah variabel terikat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh inflasi. Hal tersebut menyatakan ketika inflasi naik, akan mengakibatkan turunya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya ketika inflasi turun akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik.<sup>39</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas investasi, serta sampel penelitian yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2016-2020.

---

<sup>38</sup> Kurnia Maharani dan Sri Isnowati, Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.21, No.1, tahun 2014, hal. 62

<sup>39</sup> Herman Ardiansyah, Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal pendidikan ekonomi*, Vol.5, No.3 tahun 2017, hal. 1

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Susi dan Mispianiti 2019 bertujuan untuk mengetahui bahwa variabel terikat pengangguran, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah. Metode yang diaplikasikan dalam kegiatan penelitian ini adalah menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Pusat dengan data sekunder yang menggunakan alat analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian yang didapatkan adalah belanja modal, ketergantungan, pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, independensi, dan belanja operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat berupa indeks pembangunan manusia, desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat indeks pembangunan manusia, sedangkan adalah belanja modal, ketergantungan, pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, independensi, dan belanja operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan belanja modal dan belanja operasional berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Belanja modal, derajat desentralisasi, ketergantungan, pertumbuhan, efektivitas, dan kemandirian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran. Variabel belanja operasional, kemandirian, efektivitas, efisiensi, ketergantungan, derajat desentralisasi, dan pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>40</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel bebas kinerja keuangan dan

---

<sup>40</sup> Susi astuti, dan Mispianiti, Effects of Regional Government Financial Performance on Economic Growth, Unemployment, Poverty, and Human Development Index, *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan* Vol. 5 No.1, tahun 2019, hal. 1

variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas pengangguran, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, serta sampel penelitian yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2016-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia dan Sabri tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui bahwa variabel terikat yang digunakan berupa variabel terikat pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan investasi. Metodologi kegiatan penelitian yang diaplikasikan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan juga positif oleh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan dan juga positif oleh tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh investasi. Sedangkan secara simultan, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah, tenaga kerja dan investasi.<sup>41</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah, serta sampel penelitian yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2016-2020.

Yang terakhir adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Yursa tahun 2019 dengan bertujuan untuk mengetahui bahwa variabel

---

<sup>41</sup> Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad, Sabri. Abd. Majid, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.3, No.2, tahun 2016, hal. .109

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ekspor, inflasi, dan pengeluaran pemerintah. Metodologi penelitian yang dipakai dalam kegiatan penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder dan alat analisis berupa *analisis vector autoregression*. Hasil yang didapatkan dalam penelitian adalah variabel terikat pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi secara signifikan serta negatif oleh ekspor, variabel terikat pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi secara tidak signifikan negatif oleh variabel bebas inflasi, dan variabel terikat pertumbuhan ekonomi selain itu juga dipengaruhi secara tidak signifikan dan positif oleh variabel bebas pengeluaran pemerintah. Tidak terlalu berpengaruh terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi.<sup>42</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel terikat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perbedaan terdapat variabel bebas ekspor, pengeluaran pemerintah, dan inflasi, serta sampel penelitian yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2016-2020.

## **K. Kerangka Konseptual**

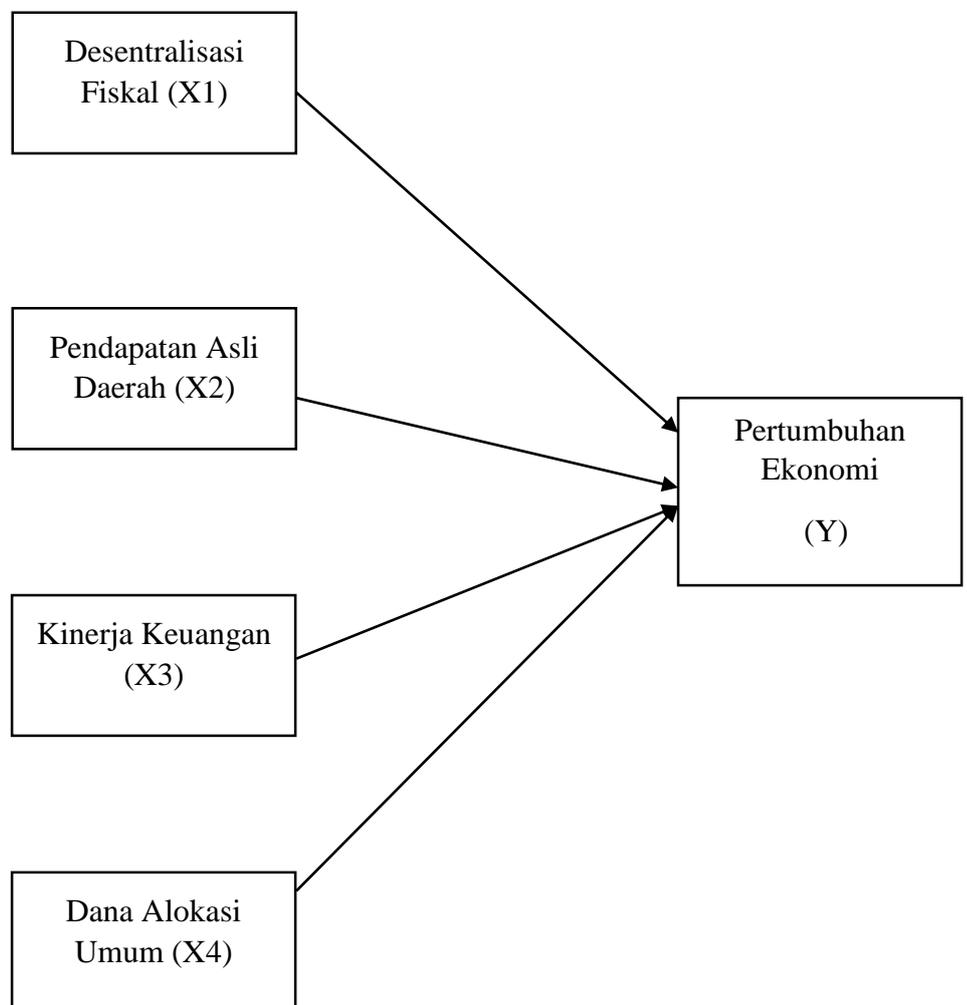
Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam kerangka konseptual dimana peneliti dapat mengetahui variabel apa saja yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat berupa pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas berupa

---

<sup>42</sup> Yusra Mahzalena dan Hijri Juliansyah, Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Volume 02 Nomor 01, tahun 2019), hal. 37

desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan daerah, dan dana alokasi umum. Sehingga penelitian dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dapat digambarkan dalam kerangka berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian atau dapat dikatakan sebagai praduga penelitian merupakan hasil sementara sebuah penelitian yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai paling tinggi kebenarannya atau kemungkinan terjadinya. Keadaan tersebut terjadi dikarenakan dalam hipotesis penelitian jawaban yang ditemukan masih berupa dari teori yang ada dan belum didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020
- H2: Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020
- H3: Terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020
- H4: Terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020

H5: Terdapat pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan daerah, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020